

Drs. Bambang Martin Baru, M.Si

Dra. Sripeni Rusbiyanti, M.Ak

Drs. Harianto, M.Si

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (GOOD GOVERNANCE) MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI MODAL SOSIAL



Editor:
Drs. Bambang Sulistiono, M.Si

Drs. Bambang Martin Baru, M.Si
Dra. Sripeni Rusbiyanti, M.Ak
Drs. Harianto, M.Si

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance)
Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance) Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

**MEWUJUDKAN
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
(GOOD GOVERNANCE)
MELALUI PENGEMBANGAN
POTENSI MODAL SOSIAL**

**Drs. Bambang Martin Baru, M.Si
Dra. Sripeni Rusbiyanti, M.Ak
Drs. Harianto, M.Si**

**Editor:
Drs. Bambang Sulistiono, M.Si**



LaksBang

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance) Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial

Penulis : Drs. Bambang Martin Baru, M.Si
Dra. Sripeni Rusbiyanti, M.Ak
Drs. Harianto, M.Si

Editor : Drs. Bambang Sulistiono, M.Si
Sampul & Layout : Omah Desain

Cetakan I : Juli 2019

Kode Produksi : LBP: 07.19.00238
x + 264 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-5452-61-1

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul: “TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA” (dalam sinergitas potensi modal sosial dan sumber daya aparatur desa), yang didasarkan dari hasil kajian Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan dibiayai oleh Ristek Dikti.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian administrasi negara khususnya menyangkut pengembangan potensi modal sosial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Good Governance, menjadi model yang dinilai strategis dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan selama ini. Praktik pemerintahan yang otoritarian dalam implementasinya dinilai sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat dewasa ini, dan bergeser pada paradigma pemerintahan yang egalitarian. Pemerintahan yang egalitarian ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena dapat mendekatkan orientasi penyelenggaraan pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara, banyak program pembangunan desa yang tidak sinkron dengan kepentingan masyarakat, akibatnya masyarakat

desa kurang merespon secara positif terhadap program pembangunan desa. Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik harus selalu melibatkan masyarakat sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa. Masyarakat desa, memiliki fungsi strategis yaitu menguatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintahan desa. Maka untuk membangun tata kelola pemerintahan desa diperlukan redefinisi peran dan fungsi masyarakat desa sebagai elemen dan unsur tegaknya sistem pemerintahan desa. Dalam prakteknya, peran masyarakat desa dalam proses kebijakan desa hanya sekedar untuk pemenuhan formalitas semata agar terlihat secara fisik keberlangsungan proses kebijakan desa secara demokratis.

Ketidakberhasilan pembangunan desa selama ini lebih disebabkan faktor kepercayaan masyarakat desa terhadap orientasi program pembangunan desa. Ketidaksinergitas antara harapan dan keinginan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan desa, menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Masyarakat desa, baik secara individu maupun secara kelompok-kelompok sosial memiliki potensi yang disebut dengan modal sosial yang dapat diberdayakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Modal sosial masih berkembang sangat kuat dalam lingkungan masyarakat desa, dan bahkan menjadi tradisi dan budaya yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial sebagai potensi berbentuk kerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan, dan apabila kerja sama itu dapat diarahkan pada pencapaian kepentingan umum akan menjadi potensi yang potensial untuk mendukung penyelesaian problem sosial pada umumnya. Potensi kerja sama dalam kehidupan masyarakat desa, sudah berlangsung turun temurun dan menjadi tradisi yang mengikat individu-individu sebagai bagian dari masyarakat desa. Kerja sama individu-individu itu, seringkali dikenal dengan istilah gotong royong.

Upaya membangun modal sosial itu, dibutuhkan trust/kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Untuk itu, bagi pemerintah desa harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintahan desa melalui program pembangunan desa itu dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi problem sosial, dan sekaligus sebagai fasilitator untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat agar dapat mempercepat kemajuan yang sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam buku ini juga dijelaskan, bagaimana strategi membangun kepercayaan masyarakat desa itu, sehingga dapat berguna untuk pengayaan bagi praktisi yang memiliki kepedulian dalam pengembangan potensi modal sosial itu. Terbangunnya kerja sama itu, akan menjadi kekuatan yang strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan perbaikan dan kajian yang lebih mendalam dalam buku ini, diharapkan dapat memberikan pengayaan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pembangunan Desa, dan strategi keterpaduan antara sumber daya sosial dengan sumber daya aparatur desa. Namun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini seperti pepatah “tak ada gading yang tak retak”, masih banyak ditemukan hal-hal yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan itu. Kami sangat terbuka menerima saran, kritik terhadap buku ini untuk perbaikan dimasa mendatang.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kemenristek-dikti yang telah memberikan dana hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang menjadi dorongan untuk menerbitkan buku ini sebagai bagian capaian luaran wajib, dan ucapan terima kasih kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan naskah akademik ini, serta kepada Rektor Universitas Merdeka Madiun yang memiliki komitmen mengembangkan tradisi penelitian di lingkungan kampus.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat memperkaya bahan bacaan tentang potensi modal sosial, sehingga dapat memberikan sumbangan referensi baik untuk keperluan studi dan kajian akademik, serta untuk keperluan praktisi pemerintahan yang menggeluti bidang administrasi negara. Untuk kalangan akademik, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi kuliah dan penelitian yang mengambil tema potensi modal sosial, dan pemerintahan desa. Untuk keperluan praktis, buku ini dapat menjadi tambahan bacaan bagi perencana, dan pengambil kebijakan, baik dari kalangan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemerintahan desa.

Madiun, Mei 2019

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Gambar.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
BABI DESA YANG BAIK.....	5
A. Latar Belakang.	5
B. Pengertian Tata Pemerintahan Yang Baik.....	9
C. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik.	13
D. Penerapan <i>Good Governance</i> dalam Pemerintahan Desa.	24
BABI II KINERJA PEMERINTAHAN DESA.....	35
A. Latar Belakang.	35
B. Definisi Pelayanan Publik.	38
C. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.	42
D. Kepuasan Publik.....	50
BABI III PERILAKU DAN BUDAYA BIROKRASI DESA	55
A. Latar Belakang	55
B. Konsep dan Dimensi Birokrasi.	57
C. Perilaku Birokrasi.	85
D. Budaya Birokrasi.	96
BABI IV DIMENSI KEBIJAKAN DAN PEMERINTAHAN DESA.....	105
A. Latar Belakang.....	105
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	108

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Good Governance*)

Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial

C. Tahapan Kebijakan Publik.	112
D. Kebijakan Pemerintahan Desa.	142
BAB V KEPEMIMPINAN DESA	147
A. Latar Belakang.	147
B. Pengertian Kepemimpinan.	152
C. Teori-teori Kepemimpinan.	155
D. Kepemimpinan Desa.	165
BAB VI APARAT DESA	173
A. Latar Belakang.	173
B. Pengertian Profesionalisme.	178
C. Faktor-Faktor profesionalisme.	183
D. Unsur-Unsur Profesionalisme.	186
BAB VII MODAL SOSIAL DALAM POTENSI WARGA DESA	217
A. Latar Belakang.	217
B. Konsep dan pengertian Modal Sosial.	223
C. Parameter dan Indikator Modal Sosial.	227
D. Bentuk-Bentuk Modal Sosial.	229
BAB VIII PEMERINTAHAN YANG BAIK: SINERGITAS POTENSI MODAL SOSIAL DAN SUMBER DAYA APARATUR DESA	235
A. Sinergitas Potensi Modal Sosial dan Sumber Daya Aparatur Desa.	235
B. <i>Trust</i> /Kepercayaan.	241
C. Regulasi atau Kebijakan.	243
D. Tindakan/perilaku.	249
DAFTAR PUSTAKA	255

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1. Lima Strategi Penerapan ” <i>Reinventing Government</i> ” dalam Kinerja Birokrasi Publik	74
Gambar 1. Matrix Analisis SWOT	118
Gambar 2. Model A Policy Implementation Process	134
Gambar 3. Wilayah Kajian Evaluasi Kebijakan Publik	140
Gambar 4. Kebijakan Publik dan Modal Sosial	221

PENDAHULUAN

Globalisasi dan demokrasi telah melanda diberbagai belahan sudut kehidupan masyarakat tidak terkecuali di pelosok pedesaan, sehingga semakin cepat terjadinya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial tersebut, mendorong semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan masyarakat akan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan desa, semakin menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan. Banyak kebijakan pembangunan yang dihasilkan bukan merupakan representasi kepentingan warga desa, melainkan kepentingan dari sebagian kecil elit-elit desa. Akibatnya program pembangunan desa tidak mampu menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan sosial yang sedang dihadapi warga desa. Sementara pelibatan warga desa dalam proses penyusunan kebijakan desa hanya sebatas pemenuhan ketentuan formalitas saja, agar nampak tercermin seakan-akan proses pengambilan kebijakan desa itu berlangsung secara demokratis.

Proses penyusunan kebijakan desatersebut, menjadi salah satu hambatan untuk mendekatkan antara tujuan pembangunan desa dengan kepentingan warga desa, akibatnya masyarakat desa bersikap apatis, masa bodoh terhadap apa yang dijalankan

oleh pemerintah desa. Apabila kondisi ini berlangsung terus dan berkelanjutan maka upaya pemerataan pembangunan yang berkeadilan masih sangat jauh dari harapan masyarakat luas. Untuk itu, pelibatan warga desa sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan proses penyusunan kebijakan pembangunan desa, mulai dari kegiatan identifikasi masalah dan penyusunan program kerja, sampai dengan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa. Pelibatan warga desa dalam proses identifikasi dan penyusunan kebijakan pembangunan diharapkan dapat mendekatkan antara keinginan, kemauan, dan harapan warga desa yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan warga desa tersebut, memiliki fungsi strategis karena warga desa akan memberikan dukungan penuh atas keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus akan memelihara pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa. Sementara itu, para penyelenggara pemerintahan desa masih meragukan akan potensi warga desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa, pada hal dari berbagai studi menghasilkan kesimpulan bahwa warga desa memiliki potensi modal sosial yang telah berkembang semenjak turun temurun dan menjadi tradisi yang mengikat kepada seluruh anggota warga desa yang dapat didayagunakan untuk mendukung berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hasil kajian Martin Baru, dkk(2017), menunjukkan, bahwa: warga desa memiliki potensi modal sosial yang potensial untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hanya saja potensi modal sosial tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah khususnya pemerintah desa untuk dapat didayagunakan secara maksimal dalam mendukung fungsi pemerintahan desa. Lebih lanjut dari hasil temuan penelitian Martin Baru, dkk (2018), menunjukkan, bahwa: modal sosial warga desa masih potensial, unsur trust/kepercayaan diantara sesama warga desa masih sangat kuat dijunjung tinggi dalam

kehidupan bermasyarakat, dan bahkan nilai kepercayaan menjadi nilai dasar yang menyangkut harkat dan martabat bagi warga desa. Demikian pula nilai kebersamaan tercermin dari keterlibatan warga desa dalam berbagai kegiatan sosial cukup baik, apalagi kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat pada umumnya sangat berperan aktif didalamnya. Norma dan nilai-nilai sosial masih sangat kuat menjadi pedoman dalam kehidupan sosialnya, seperti nilai gotong royong, kebersamaan, saling membantu, tolong menolong, dan lain sebagainya. Hanya saja yang menjadi permasalahannya, belum adanya sinergitas antara potensi modal sosial dengan potensi sumber daya aparatur desa, akibatnya belum terwujud *trust* atau kepercayaan warga desa terhadap pemerintahan desa.

Trust dapat dibangun melalui tindakan dan kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat desa. Tindakan dimaksudkan sebagai sikap dan perilaku perangkat desa yang mampu ditunjukkan kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Perangkat desa harus memiliki sikap untuk selalu memberikan perhatian manakala warga desa memiliki kesulitan-kesulitan dalam pengurusan pelayanan publik. Perangkat desa harus mau memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga desa, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian pula, dengan kebijakan khususnya menyangkut pembangunan desa harus ada keberpihakan dengan kepentingan warga desa. Pelibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan tidak hanya diukur dari keterlibatannya dalam forum musyawarah desa saja, melainkan hasil dari musyawarah desa itu dapat diaktualisasikan kedalam program pembangunan desa. Apabila masyarakat meyakini bahwa program pembangunan desa yang dihasilkan nantinya benar-benar merupakan hasil musyawarah desa, maka masyarakat akan memberikan dukungan yang

positip atas keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Kepercayaan itulah yang mampu menumbuhkan potensi modal sosial warga desa, yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, keswadayaan dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Gotong royong, menurut Kusnaedi (2006), merupakan sikap positive yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam Widjaja (2004), gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya. Gotong royong yang berkembang dalam masyarakat desa mampu menghasilkan keswadayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Keswadayaan masyarakat dapat berupa semangat warga desa untuk mengatasi segala masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan desa. Keberhasilan pembangunan desa selama ini tidak dapat dilepaskan dari keswadayaan warga desa, karena adanya keterbatasan anggaran pembangunan desa. Dengan adanya keswadayaan warga desa mampu menghasilkan potensi sumber daya material dan atau sumber daya fisik berupa tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Kuatnya keswadayaan warga desa karena dilandasi oleh adanya perasaan persaudaraan dan senasib sepenanggungan dapat mendorong lebih banyak warga desa ikut serta dalam proses pembangunan yang partisipatif. Dengan tumbuh dan berkembangnya modal sosial dapat didayagunakan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.*
- A.F.Stoner James, dkk, 1996, Manajemen, Edisi Indonesia, Jakarta: Penerbit PT. Prenhallindo.*
- Anderson James E, 1984. Public Policy Making, New York, Holt, Rinehart and Wiston.*
- Antonacopoulou dan Gerald, 1996, The Handbook of Industrial, Work, and Organizational Psychology, (pp. 53-76). London: Sage Publications*
- Bappenas, 2002, Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Jakarta: Bappenas & Depdagri.*
-, 2007, Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah 2007. Jakarta: Bappenas.*
- Bass dan Avolio, 1994, Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*
- Budi Wibowo, 2011, Teori Kepemimpinan, Makalah disampaikan pada Pembekalan.*
- Burns, James Max Gregor, 1978, Leadership, New York: Haper & Row.*

- Boulter *et.al* 2001, *Human Resource Management (Seventh Edition)*, London: Prince Hall International Inc,1996
- Byars dan Rue, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney:Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney:ABC Boook.
- Dimock, Dimock & Keoning, 1960, *Public Administration*, Renehart and Coy. Inc., New York
- Donovan, F & AC. Jackson, 2001, *Managing Human Service Organizations*, New York, NY:Precentice Hall.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, (Makalah).
-, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
-, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dunn, William. N. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Efendi, Sofian, 1996, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara.
- Fadel Muhammad, 2008, *Reinventing Local Government: Pengalaman Dari Daerah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fajar Surahman, *Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Memperkuat Kemandirian Desa*.
- Fukuyama, Francis, 1995, *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Penerbit Qolam.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1995, *Organizations*, terjemahan, Richard. D. Irwin. Inc.

- Gering Supriyadi dan Tri Guno, 2006, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- George R Terry, 1993, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Harbani Pasalong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hater dan Bass (1988
- Handoko, T.Hani, 2001, *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*, Yogyakarta: Penerbit: BPFE.
- Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Hasbullah, J., 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit MR-United Press.
- Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan VII, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jamaluddin, Ancok, 1999, *Manajemen Personalia*, Edisi Keenam, Jilid Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Joko Widodo, 2005, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Jakarta: Pustaka Bayumedai Publising.
- Kadarwati. Tri, 1988, *Administrasi Negara Perbandingan*, Modul UT, Jakarta: Penerbit Karunika.
- Kartini, Kartono, 1982, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Kerlinger dan Padhazur, 1987, *Asas-Asas Penelitian Behavior*, Terjemahan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Keban, Yeremeas, T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Issue*, Yogyakarta: Pustaka Gava Media.
- Kridawati Sadhana, 2011, *Realitas Kebijakan Publik*, Malang: Pustaka Universitas Negeri Malang (University Press).

- Korten dan Alfonso (1998, *Transforming a Bureaucracy (the Experience of the Philippine National Irrigation Administration)*, Ateneo De Manila University Press.
- Korten, David C, 1993, *Pembangunan Yang Memihak Rakyat*, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pembangunan.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2006, *Akuntabilitas Birokrasi Politik*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Lalolo Krina, 2007, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*”, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2008, *Operasional Pelayanan Prima*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
- Lawang, Robert M.Z, 2005, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Penerbit FISIP UI Press.
- Luankali, Bernadus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik dalam proses pengambilan Keputusan*, Jakarta: Penerbit Amelia Press.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pohan, Max H, 2000, *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik dalam Era Otonomi Daerah*, makalah yang disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Buku kedua.
- Martin Baru, Dkk, 2018, *Pembangunan Desa Berbasis Modal Sosial*, Solo: Penerbit Taujih.

- Michael Hill, (ed), 1993. *The policy Process*. New york: harvester-Wheatsheaf.
- Mintzberg, Henry, *Structure In Five; Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, 1983
- Ganie-Rochman, Meuthia dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga. Komnas HAM, Jakarta. 2000
- M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan regulasi Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Muhammadi, Arni, 2001, *Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- AR. Mustopadidjaya, AR, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN.
- Mochammad Zaini Mustakim, 2015, *Buku 2 Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik.
- Nasution, AA, 2005, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nitisemito, Alex, 2002, *Manajemen suatu Dasar Pengantar*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nugroha, Riant, 2004, *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Numberi, Fredy, 2000, *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Makalah.
- Osborne & Plastrik, 1997, *Memangkas Birokrasi* (terjemahan), Jakarta: Penerbit PPM.

- Prijodarminto, 1993, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Penerbit PT.Gunung Agung.
- Ranupandojo, Heidjrachman & Suad Husnan, 2000, *Manajemen Prilaku Organisasi*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Rusydi Syahra, *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003
- Wasistiono, Sadu. 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.
- Said.2007). Sosiologi politik; Konsep dan. Dinamika Perkembangan kajian. Bandung: *Pustaka Setia*
- Samudro, Wibawo, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Santosa, Heru dkk, 1992, *Sastra: Teori dan Implementasinya*. Penerbit: Yuma Pustaka. Surakarta.
- Salusu, 1998, *Pengambilan Keputusan stratejik: untuk Organisasi publik dan Non Profit*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Salim & Woodward, 1992. Analisis Pelayanan Publik. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Sarwoto, 1990, *Dasar - Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
-, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Siswanto, Bedjo. 1989, *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Syafaruddin, Alwi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sudiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program)*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Penerbit Fisipol. UGM.

- Suhirman. 2004, *Kerangka Hukum dan Kebijakan tentang Partisipasi di Indonesia*. Bandung: Ford Foundation.
- Sujak, Abi, 1990, *Kepemimpinan Manajer Eksistensinya Dalam Perilaku Organisasi*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunoto. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*. Cetakan pertama. Yogyakarta: CAPS
- Suradinata, E., 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Ramadan.
- Sugandha dan Fernanda, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Setiono, 2004, *Rule of law (supremasi hukum)*. Tesis Pascasarjana Fakultas. Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soepandji, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Soenarko, 2000, *Public Policy*, Surabaya: Penerbit Airlangga University.
- Soerjono Soekanto. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2010, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005. Hal 85-97.
- Stuart Emmel, 2001, *Disiplin*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Silahuddin, M, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes, Jakarta.
- Pasolong. Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Terry, George R., 1993, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Tjiptono, 2005, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah, 1987, *Perilaku Organisasi*, (Cetakan X), Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
-,1992, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Cetakan V, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Veithzal Rivai, 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Penerbit Rajawali pers.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Waluyo, 2007, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi daerah*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Wibawa, dkk, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada Unoversiry Press.
- Widodo, Joko, 2007, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Jakarta: Pustaka Bayumedai Publising.
- Winarno, Budi, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Wexley dan Yukl, 1988, *Leadership in Organizations*. 2nd Ed. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Zauhar, Susilo, 1998, *Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Yulk, Gary, 1994. *Leadership In Organizations*. America: Prentice Hall International.

Konsideran:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Permen Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Kepmen PAN Nomor. 58 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan.

Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Web-site:

Abdul Hakim dan Endah Setyowati, Perubahan kelembagaan pemerintahan Desa Dan Tantangannya terhadap Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa, Brawijaya University, Malang. <http://kelembagaandas.wordpress.com>>.diakses Pebruari 2019

Putu Pratya, 2013, Perspektif dan Tipologi Modal Sosial, putupratya.blogspot.com/.../perspektif-dan-tipologi-m..., diakses tanggal. 27 Januari 2019

bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=885
<https://gurupkn.com/ciri-ciri-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>).

www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/ceritahesti.blogspot.com/2013/.../paradigma-reinventing-government.ht.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Good Governance*)
Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial

www.fputm.my/.../pdf/fail/.../

LIMYEECHIANAP000222D2004TTP.pdf – Mirip

paradigmakaumpedalaman.blogspot.com > *Sosial Politik*

kertyawitaradya.wordpress.com /.../implementasi-kebijakan-publik-m...)

dppka.jogjaprovo.go.id/upload/files/good_government.pdf

repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20II.pdf)

([https:// alisadikinwear. wordpress.com/.../modal-sosial-d.](https://alisadikinwear.wordpress.com/.../modal-sosial-d.)).